

Efektivitas Pengelolaan Data Aspirasi Masyarakat Daerah (Asmasda) Pada Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Fandi Rizki Rosyari¹, Nurliah Nurdin², R. Luki Karunia³
Politeknik STIA LAN Jakarta^{1,2,3}
fandi.2042021035@stialan.ac.id¹

Abstract

This research aims to analyze the effectiveness of Puskadaran DPD RI support in managing Regional Community Aspirations. This research uses qualitative research through a descriptive analytical approach. The data collection method in this research uses interview scripts, field notes, personal documents, memo notes, and other official documents originating from the Puskadaran DPD RI. Furthermore, the qualitative data obtained was analyzed by taking into account the work description of the Puskadaran DPD RI, the results of the suitability analysis, and the analysis measuring effectiveness, so that research conclusions were formulated. The research findings show that the fundamental problems in managing Regional Community Aspirations data include the process of inputting Regional Community Aspirations data which is declining, the system or work mechanism within the scope of the Puskadaran DPD RI is not working well, and the lack of HR personnel at the Puskadaran DPD RI. So, to fulfill and measure the effectiveness of Regional Community Aspirations data management at the Puskadaran DPD RI used the goal attainment approach and systems approach by Stephen P. Robbins. Therefore, Puskadaran DPD RI needs to adopt an effectiveness model that can minimise obstacles to the effectiveness of Asmasda data management. Such as making standard operational, increasing human resources, creating integration channels between various fields, creating inclusive communication mechanisms, and creating innovative work programmes.

Keywords: Center for Regional and Budget Studies, DPD RI, Effectiveness, Regional Community Aspirations.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dukungan Puskadaran DPD RI dalam mengelola Aspirasi Masyarakat Daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya yang berasal dari Puskadaran DPD RI. Selanjutnya, data kualitatif yang diperoleh dianalisis dengan memperhatikan deskripsi kerja Puskadaran DPD RI, hasil analisis kesesuaian, dan analisis pengukuran efektivitas, sehingga dirumuskan kesimpulan penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa permasalahan mendasar dalam pengelolaan data Aspirasi Masyarakat Daerah antara lain adalah proses penginputan data Aspirasi Masyarakat Daerah yang semakin menurun, sistem atau mekanisme kerja di lingkup Puskadaran DPD RI yang belum berjalan dengan baik, dan kurangnya jumlah personil SDM di Puskadaran DPD RI. Maka, untuk memenuhi dan mengukur efektivitas pengelolaan data Aspirasi Masyarakat Daerah di Puskadaran DPD RI digunakan pendekatan pencapaian tujuan dan pendekatan sistem oleh Stephen P. Robbins. Oleh sebab itu, Puskadaran DPD RI perlu mengadopsi model efektivitas yang dapat meminimalisir kendala pada efektivitas pengelolaan data Asmasda. Seperti pembuatan standar operasional yang baku, peningkatan sumber daya manusia, menciptakan kanal integrasi antar berbagai bidang, menciptakan mekanisme komunikasi yang inklusif, serta membuat program kerja yang bersifat inovatif.

Kata Kunci: Puskadaran, DPD RI, Efektivitas, Aspirasi Masyarakat Daerah

PENDAHULUAN

DPD RI disahkan 9 November 2001 pada amandemen ke-3 UUD 1945. Namun, tidak serta merta langsung hadir DPD RI sebagai lembaga tinggi negara di parlemen. Setelah proses pemilu 2004, maka secara resmi terpilihlah Anggota Legislatif DPD RI dan menjadi sebuah lembaga tinggi negara sesuai dengan amanah amandemen ke-3 UUD 1945. MPR, DPR, dan DPD RI terbentuk secara resmi pada tanggal 1 Oktober 2004. Ketua DPD RI pertama adalah Ginandjar Kartasasmita, Wakil Ketua Irman Gusman dan La Ode Ida. Ide dasar dibentuknya DPD RI adalah untuk mengakomodir kepentingan daerah sehingga daerah mempunyai peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan strategis yang terkait dengan kebutuhan suatu daerah.

Dalam konteks Indonesia khususnya DPD RI, mekanisme penyerapan aspirasi hingga pembahasan UU termuat dalam UUD 1945 pasal 22 D, DPD RI memiliki fungsi mengajukan rancangan UU, ikut membahas UU dan ikut melakukan pengawasan UU yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, DPD RI harus menyerap seluruh aspirasi kepada setiap individual Anggota DPD RI di daerah pemilihannya. Kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat, kemudian dikompilasi dan diolah menjadi sebuah data yang menjadi acuan DPD RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya, ini disebut dengan data Aspirasi Masyarakat Daerah (Asmasda). Asmasda kemudian didapatkan dari Anggota DPD RI yang dilakukan pada masa persidangan dan/atau masa non-persidangan. Istilah ini dikenal sebagai masa reses, di mana Anggota DPD RI terjun ke masyarakat khususnya di dapilnya masing-masing untuk membentuk kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat.

Dalam mengaktualisasikan tupoksinya, DPD RI memiliki sistem pendukung, yakni sebuah organisasi formal yang terlembaga sejajar dengan Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal DPD RI (Setjen DPD RI) mempunyai fungsi untuk mendukung administrasi serta koordinasi ahli terhadap DPD RI secara kelembagaan. Dalam hal ini, Anggota DPD RI mendapatkan alat-alat kelengkapan kerja dan *support system* kerja Anggota DPD RI. Untuk memfasilitasi kinerja Anggota DPD RI dalam pengelolaan data Asmasda, maka Setjen DPD RI membentuk sebuah bidang kerja Pusat Kajian Daerah (Puskada). Pada periode keanggotaan DPD RI tahun 2019 - 2024, pengelolaan data Asmasda dilakukan oleh Puskada DPD RI sudah terfasilitasi melalui aplikasi serapan Asmasda yang selanjutnya tabulasinya dapat diakses oleh anggota DPD RI, sebagai bahan masukan dalam pembahasan RUU di masa persidangan. Namun serapan data Asmasda masih belum bekerja secara optimal. Berdasarkan data Aspirasi dan Prioritas Materi pada masing-masing alat-alat kelengkapan kerja DPD RI yang menghimpun materi perundangan yaitu Komite 1 sampai 4, laporan hasil input data Asmasda dari 8 Oktober 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022 menunjukkan tren yang masih rendah.

Masih banyak provinsi yang belum menampilkan jumlah aspirasi daerah dan prioritas materi undang-undang sesuai tugas Anggota Dewan pada masing-masing alat-alat kelengkapan yang berhasil dihimpun di daerah pemilihan (dapil). Padahal setiap Anggota DPD RI memiliki dukungan staf administrasi dan staf ahli untuk membantu menjalankan kerja administrasi dan keahlian. Manakala tugas kerja dari staf ahli Anggota dalam menghimpun data Asmasda yang seharusnya masuk pada web publik Asmasda.go.id tidak dilakukan, maka seharusnya disitulah peran dari semua pihak yang berkepentingan dengan data Asmasda mengingatkan dan mengkoordinasikan bahkan mungkin mengambil alih tugas penghimpunan data Asmasda, agar data Asmasda dimaksud bisa

terkompilasi di web publikAsmasda.go.id yang selanjutnya menjadi tugas Puskadaran untuk mengolah, membuat kajian dan menyajikan data Asmasda (Mataris, 2022). Disinilah pentingnya pedoman kerja bagi seluruh pihak yang bertugas dan berkepentingan terhadap data Asmasda dibuat, agar bisa terwujud komitmen kerja yang terintegrasi.

Beberapa persoalan yang mendasar dalam pengelolaan data Asmasda dapat dikelompokkan menjadi dua persoalan, yakni persoalan internal dan eksternal. Persoalan internal meliputi: sistem atau mekanisme kerja yang tidak mendukung; dan jumlah sumber daya manusia yang tidak mendukung. Sementara itu, persoalan eksternal juga memberikan kontribusi terhadap kurangnya efektivitas pengelolaan Asmasda, salah satunya tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam menyalurkan aspirasinya ke anggota DPD RI selama masa reses berlangsung. Masyarakat menganggap bahwa masa reses yang dilakukan oleh anggota DPD RI hanya bersifat prosedural belaka daripada menyelesaikan persoalan mendasar yang melanda masyarakat. Seyogyanya, masa reses merupakan forum atau ruang terbuka yang harus dimainkan oleh masyarakat dengan tujuan yakni merealisasi program yang seharusnya dijalankan pemerintah seperti infrastruktur, ekonomi, dan persoalan lainnya. Maka tidak mengherankan apabila tingkat kepercayaan anggota DPD RI selalu berada di papan bawah.

Di tahun 2022, DPD RI sebagai institusi publik masih memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah dibandingkan dengan institusi publik lainnya, beberapa laporan lembaga survei menyatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPD RI berada di bawah angka 50% (Lanten, 2022). Ini memberikan implikasi terhadap kinerja anggota DPD RI dalam memberikan data Asmasda kepada Puskadaran DPD RI. Sehingga, kesadaran anggota DPD RI terhadap Puskadaran DPD RI sebagai unit kerja dalam pengelolaan data Asmasda masih belum maksimal. Untuk mengatasi persoalan ini, tentu perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh baik yang sifatnya internal maupun eksternal dengan tujuan guna meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan data Asmasda.

Untuk mengungkap persoalan yang terjadi pada DPD RI khususnya mengenai persoalan dalam proses penginputan data Asmasda yang dibuktikan dengan penurunan data Asmasda dari periode sebelumnya. Perlunya meninjau kembali efektivitas pengelolaan data Asmasda yang dilakukan oleh Puskadaran DPD RI. Hal ini menurut pengamatan penulis diakibatkan oleh belum adanya kerangka model yang ideal dalam mengatur pengelolaan data Asmasda yang berasal dari Anggota DPD RI ketika masa reses berlangsung. Selain itu, sistem atau mekanisme kerja yang berada di lingkup Puskadaran DPD RI belum bekerja dengan baik dikarenakan terbentur pada struktur birokrasi kerja dalam merespon kekosongan data Asmasda. Persoalan lainnya terkait dengan SDM di Puskadaran DPD RI, kurangnya personalia SDM Puskadaran DPD RI memberikan kontribusi terhadap tingkat efektivitas pengelolaan data Asmasda.

Oleh sebab itu, penulis berupaya melihat efektivitas pengelolaan data Asmasda, serta menawarkan kerangka model yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan Asmasda. Dengan menggunakan pendekatan efektivitas Stephen P. Robbins, penulis hendak meninjau bagaimana aspek pencapaian tujuan atau target yang terpenuhi oleh suatu organisasi, sistem organisasi yang bekerja di dalamnya, mengelola kelompok kepentingan yang berada di lingkungannya serta nilai (*value*) apa yang menjadi aturan main dalam pengelolaan data Asmasda. Menurut Mulyasa (2011) bahwa organisasi dapat dikatakan efektif apabila dilihat dari berbagai sudut pandang baik sudut pandang

organisasi, pekerja di dalamnya, lingkungan organisasi maupun karakteristik dari manajemen suatu organisasi. Artikel ini menawarkan kerangka model pengelolaan Asmasda yang ideal guna menunjang efektivitas dari kinerja Puskadaran DPD RI. Hal ini sangat diperlukan karena masih belum terdapat kerangka kerja yang bersifat berkelanjutan.

KAJIAN LITERATUR

Efektivitas bisa dilihat dari pencapaian keberhasilan dari tujuan yang telah dibuat. Semakin besar hasil yang diperoleh, semakin besar efektivitas kerja yang dilakukan. Ambarwati (2018) menjelaskan efektivitas adalah ketepatan tujuan dari suatu proses mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, efektivitas organisasi mengacu pada ketepatan proses yang terjadi di lembaga formal yang berkolaborasi dengan komponen yang saling berkoordinasi untuk memenuhi tujuannya (Pasolong, 2013). Pendapat lain terkait efektivitas, bahwa efektivitas organisasi akan sulit terwujud apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana kerja yang memadai. Tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang besar yang diberikan oleh organisasi harus didukung oleh fasilitas kerja yang mendukung para pegawainya lebih kreatif dan inovatif. Sudah barang tentu nantinya akan menghasilkan output kerja sesuai tujuan organisasi. Moenir (1987) menjelaskan sebagai berikut: Fasilitas kerja adalah segala sesuatu yang digunakan, ditempati dan dinikmati oleh pekerja yang berhubungan langsung dengan pekerjaan mereka dan dengan operasi yang efisien dari pekerjaan tersebut.

Dalam konteks studi ini, konsep efektivitas menjadi kunci penting dalam melihat kinerja Puskadaran DPD RI terutama dalam mengelola Asmasda. Selain itu, efektivitas juga melihat *output* yang dihasilkan oleh Puskadaran DPD RI, apakah dapat membantu dalam memberikan bahan masukan khususnya di alat-alat kelengkapan DPD RI. Efektivitas juga mengungkap beberapa gejala yang menjadi faktor penghambat dari ketidakefektifan Puskadaran DPD RI dalam mengelola Asmasda, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengelolaan Asmasda masih belum berjalan secara efektif. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan *efektivitas adalah seberapa besar capaian yang dihasilkan dari sebuah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya*. Di mana capaian tersebut diperoleh dari sebuah proses yang terjadi sebagai sebuah akibat atas pekerjaan yang dilakukan. Hoy & Miskel (2001) mengatakan bahwa sebuah organisasi dikatakan berhasil jika mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sekaligus menggunakan sumber dayanya dengan cara mendorong keselarasan.

Membicarakan efektivitas organisasi, menurut Stephen P. Robbins dalam bukunya yang berjudul *Teori Organisasi; Struktur, Desain & Aplikasi* dijelaskan bahwa mendefinisikan efektivitas organisasi banyak menceritakan nilai dari individu lain daripada mengenai organisasi yang ingin dinilai (Robbins, 1994). Robbins (1994) menguraikan bagaimana mengukur efektivitas melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment Approach*)
Asumsi dari pendekatan ini adalah organisasi adalah entitas yang memiliki tujuan, logis, dan berorientasi pada tujuan. Oleh karena itu, pencapaian sasaran/tujuan merupakan indikator yang sesuai untuk mengukur suatu keberhasilan.

b. Pendekatan Sistem (*System Approach*)

Pendekatan sistem menilai bahwa efektifitas suatu organisasi dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti relasi dengan lingkungan organisasi dalam menjamin adanya masukan-masukan, respon yang fleksibel terhadap perubahan lingkungan, efisiensi suatu organisasi, komunikasi yang jelas di internal organisasi, eskalasi konflik diantara kelompok-kelompok, dan tingkat kepuasan kerja para pegawai/pekerja (Robbins, 2008). Pendekatan sistem menekankan pada karakteristik yang akan meningkatkan kelangsungan hidup jangka panjang organisasi, seperti kemampuan asosiasi untuk mendapatkan sumber daya, mempertahankannya secara internal sebagai organisasi sosial, dan berhubungan secara efektif dengan lingkungan sekitarnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Maka penelitian dengan metode deskriptif ini menggunakan model deduksi dimana teori menjadi alat penelitian untuk mengukur efektivitas organisasi yaitu dengan tahapan penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan melihat, mengkaji, dan mengukur efektivitas pengelolaan Asmasda yang ada di Setjen DPD RI khususnya Puskadaran DPD RI (Bungin, 2011).

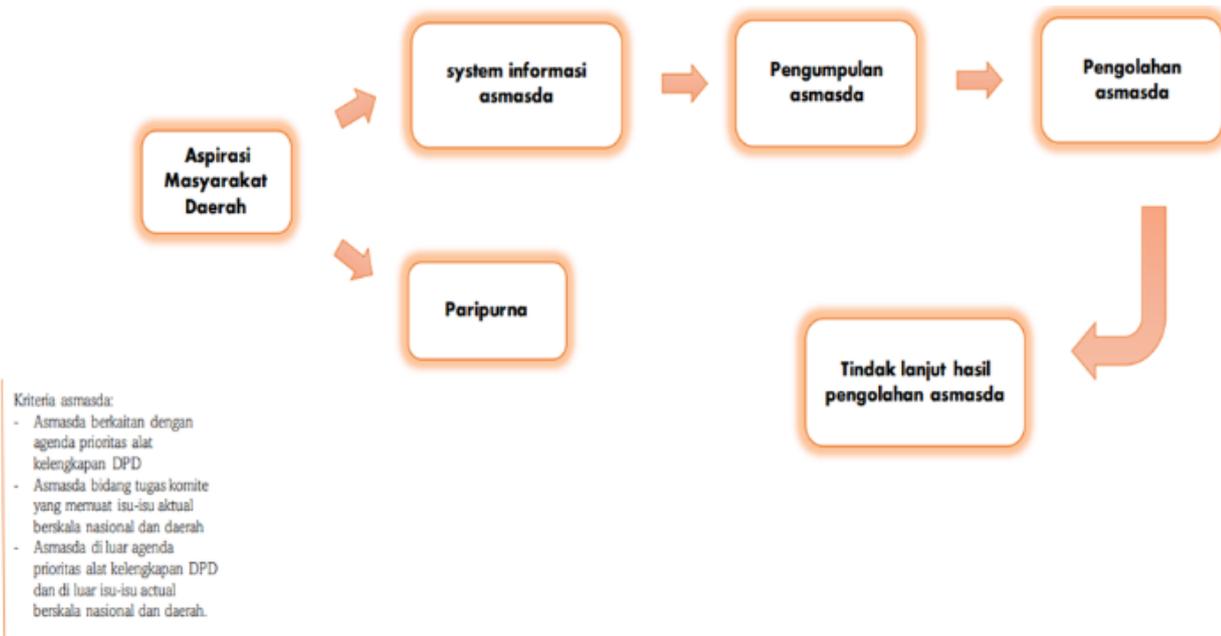
Teknik pengumpulan data pada artikel ini menggunakan *indepth interview* (wawancara mendalam), dokumen organisasi dan hasil observasi penulis yang bersumber dari organisasi Puskadaran DPD RI. Penelitian kualitatif melalui metode pengumpulan data tersebut, berupaya melihat data yang tak tampak, serta memperdalam temuan-temuan yang dihasilkan. Data yang telah didapatkan akan disusun secara sistematis, serta diolah dan dianalisis oleh penulis. Berikut ini langkah-langkah dalam analisis data yang digunakan oleh penulis, antara lain (Sugiyono, 2011):

- a. Transkrip data
- b. Kategorisasi data
- c. Deskripsi efektivitas
- d. Analisis kesesuaian
- e. Analisis mengukur efektivitas
- f. Penyimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengelolaan Data Aspirasi Masyarakat Daerah (Asmasda) Puskadaran DPD RI

Pada tahap menghimpun data Asmasda, terdapat dua sumber yang diperoleh Puskadaran DPD RI yakni bersumber dari Anggota DPD RI ketika masa reses maupun non-reses dan bersumber dari Kantor DPD di setiap ibu kota provinsi. Lebih lanjut, setiap staf ahli Anggota DPD RI pusat/daerah kemudian melakukan penginputan data Asmasda melalui kanal-kanal yang disediakan oleh Puskadaran DPD RI yaitu aplikasi publikAsmasda. Data yang telah diinput kemudian diklasifikasikan menjadi beberapa jenis seperti: a) aspirasi yang diinput oleh staff anggota baik di level pusat maupun daerah; b) aspirasi masyarakat masa siding melalui audiensi; c) asmas ketika masa reses yang diselenggarakan menggunakan audiensi; d) asmas yang disampaikan setiap waktu melalui aplikasi.



Gambar 1. Skema Penghimpunan Data Asmasda

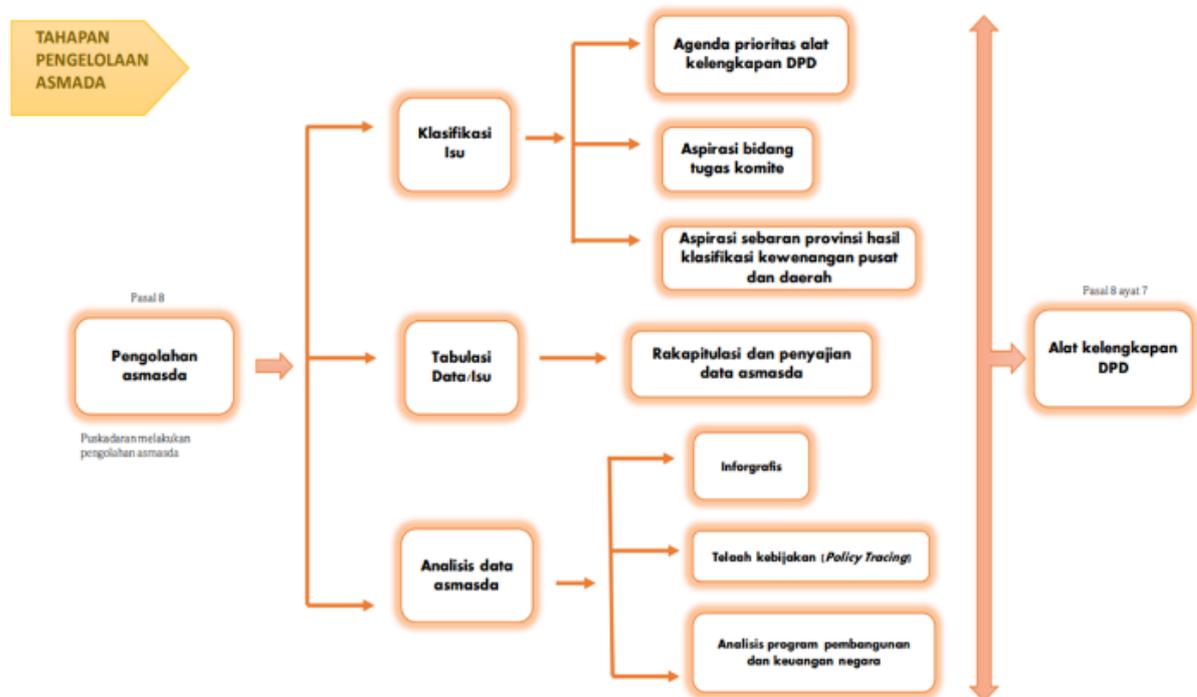
Ketika setelah terklasifikasi semua, kemudian data Asmasda dikoordinasikan dengan pihak yang terlibat dalam pengelolaan data Asmasda, berikut skema koordinasi dalam pengelolaan data Asmasda:



Gambar 2. Skema Koordinasi Pengelolaan Data Asmasda

Pada tahap ini, data Asmasda yang dihimpun kemudian diserahkan kepada mekanisme paripurna Anggota DPD RI. Sebelum masuk ke mekanisme paripurna, para staf Anggota DPD RI wajib menyampaikan seluruh laporan Asmasda melalui sistem informasi Asmasda paling lambat 1 hari sebelum sidang paripurna pembukaan masa sidang DPD dimulai. Kemudian panitia musyawarah mengkompilasi laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan masing-masing dan menyerahkan ke setiap unit-unit alat kelengkapan dewan. Mekanisme koordinasi pengelolaan Asmasda melibatkan Biro Persidangan, beberapa bagian yang ada di Biro Persidangan dan Puskadaran, yaitu: Biro Persidangan dan Dokumentasi, Puskadaran, Sekretariat Komite. Puskadaran yang

memiliki tugas dan fungsi sebagai pengolahan data Asmasda akan berkoordinasi dengan Sekretariat Komite dalam bentuk: a) penyampaian hasil analisis Asmasda dan b) inventarisasi topik penelitian dan kajian. Koordinasi ini dilakukan di akhir masa reses. Selanjutnya, Komite akan menerima penyampaian analisis Asmasda untuk seterusnya dilakukan pembahasan program oleh Anggota DPD di alat kelengkapan komite.



Gambar 3. Tahap Pengolahan Data Asmasda

Pada tahap pengolahan Asmasda, Puskadaran DPD RI mengolah data dengan memberikan disposisi ke setiap bidangnya. Terdapat tiga aspek yang dalam mengolah Asmasda. Aspek yang pertama terkait dengan klasifikasi isu, Puskadaran kemudian memberikan tugas kepada bidang yang bertanggung jawab dalam melakukan klasifikasi isu yang diperoleh dari Asmasda. Klasifikasi isu ini memuat tentang agenda prioritas sebagai alat kelengkapan DPD, aspirasi bidang tugas komite dan aspirasi sebaran provinsi hasil klasifikasi kewenangan pusat dan daerah. Pada aspek kedua, Puskadaran memiliki tugas yakni melakukan tabulasi data/isu dengan cara merakapitulasi data yang diperoleh dan melakukan penyajian terhadap data Asmasda. Sedangkan aspek terakhir yakni melakukan pengkajian dan analisis terhadap data. Data Asmasda diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan data berupa infografis terutama terkait sebaran data Asmasda, kemudian sebagai telaah kebijakan dan sebagai analisis pembangunan dan keuangan negara.



Gambar 4. Mekanisme Penyusunan Database Kajian

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa tahapan ini merupakan tahapan terakhir dari pengolahan data Asmasda dengan cara melakukan penyusunan database kajian dan analisis terutama pada tiga fokus kajian yang berkaitan dengan fungsi dan peran DPD RI yakni persoalan tentang perkembangan hubungan pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaan otonomi daerah dan proyeksi hubungan pusat-daerah serta pelaksanaan otonomi daerah untuk 5 tahun mendatang. Dari fokus kajian tersebut, dihasilkan menjadi sebuah laporan kinerja Puskaradan DPD RI yang ditujukan untuk *supporting system* DPD RI.

Kompilasi Data Asmasda Berdasarkan Masa Reses Anggota DPD RI

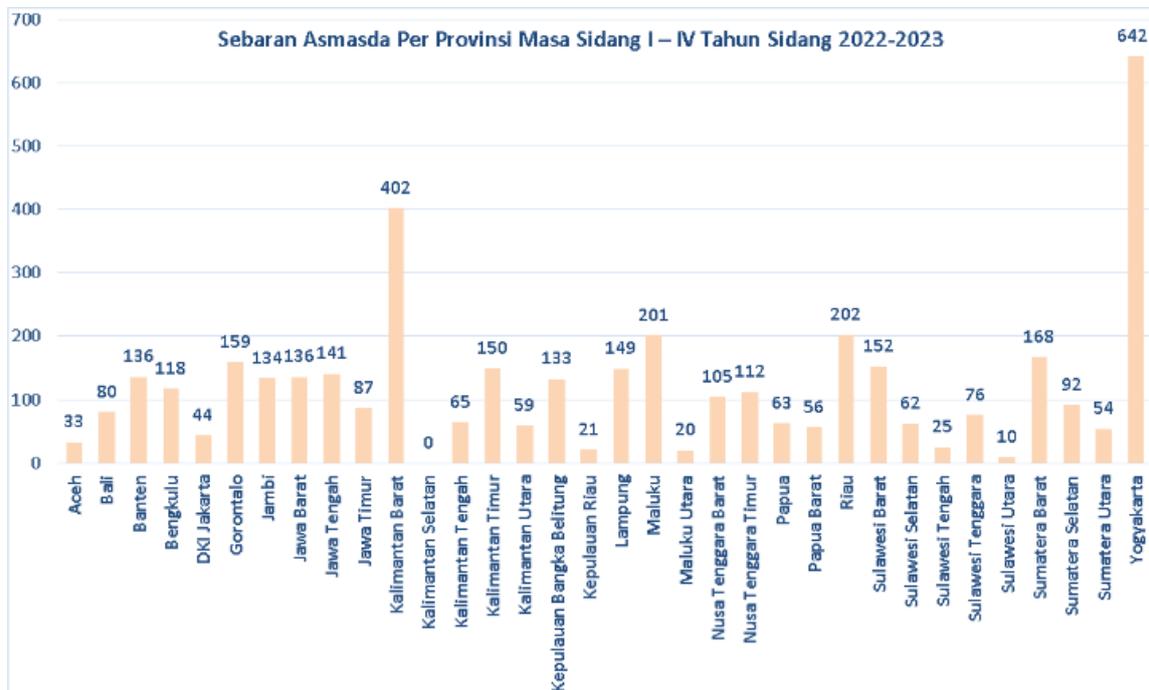
Berdasarkan data dari Sekretariat Panitia Musyawarah (Panmus) DPD RI tercatat selama Tahun Sidang 2022-2023 telah dilaksanakan 4 (empat) kali kegiatan reses anggota DPD RI di wilayah pemilihannya. Setiap masa reses, Anggota DPD RI memiliki agenda prioritas sesuai bidang tugas masing-masing Komite yang disusun berdasarkan urgensi penyelesaian dan menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian khusus. Dari agenda prioritas tersebut menjadi landasan bagi alat kelengkapan khususnya Komite dan BULD dalam menyusun program kerja di masa sidang berikutnya.

No.	Alat Kelengkapan	Jumlah Asmasda
1	Komite I	558
2	Komite II	1175
3	Komite III	1363
4	Komite IV	904
5	BULD	87
Total		4087

Tabel 1. Rekapitulasi Data Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Asmasda) Masa Sidang I – IV Tahun 2022 -2023

Sebanyak 4087 aspirasi masyarakat dan daerah dalam tabel di atas tersebar dalam 5 (lima) alat kelengkapan utama DPD RI yaitu Komite I, II, III dan IV serta Badan Urusan

Legislatif Daerah (BULD). Kehadiran BULD sebagai pelaksanaan amanat undang-undang yang memberikan kewenangan tambahan kepada DPD RI dalam melakukan pengawasan atas Peraturan dan Rencana Peraturan Daerah (Perda & Ranperda) sehingga masih belum maksimal data (87 aspirasi) yang berhasil dihimpun dalam sistem aplikasi publikAsmasda.dpd.go.id.



Gambar 4. Sebaran Asmasda Per Provinsi Masa Sidang I – IV Tahun Sidang 2022-2023

Provinsi DIY menunjukkan data paling tinggi (642 Asmasda) dibanding provinsi lainnya di Indonesia dalam hal penyerapan aspirasi permasalahan di daerah selama periode Tahun Sidang 2022-2023, diikuti Provinsi Kalimantan Barat (402 Asmasda) dan Provinsi Riau (202 Asmasda). Hasil Pengolahan Asmasda ditindaklanjuti oleh masing-masing alat kelengkapan yang sudah diklasifikasi/dianalisis oleh Puskadaran. Apabila dilihat lebih dalam, gambar di atas menunjukkan terjadi ketimpangan data yang masuk di setiap provinsi.

Hal ini memberikan penanda bahwa masih ada Anggota yang belum memanfaatkan fasilitas web publik Asmasda yang disediakan oleh Puskadaran untuk menghimpun tabulasi data Asmasda DPD RI yang diperoleh Anggota dari dapilnya. Terungkap bahwa tingkat kesadaran, keterbutuhan Anggota dalam konteks membangun sistem data Asmasda masih belum kuat. Namun demikian keadaan ini tidak mengurangi kinerja Puskadaran DPD RI dalam pengelolaan data Asmasda untuk melakukan analisis, penelitian dan pengkajian data Asmasda yang masuk di web publik Asmasda. Puskadaran memastikan tidak ada satupun data Asmasda yang tidak diolah, data yang terlambat masuk tetap akan diolah untuk masa sidang berikutnya.

Pendekatan Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment Approach*)

Pendekatan tujuan menurut Stephen P. Robbins telah digunakan oleh Puskadaran DPD sebagai salah satu cara mengukur efektifitas pengelolaan Asmasda. Tujuan jangka pendek dan jangka panjang dijabarkan dalam target capain (*outcome*) pengelolaan data Asmasda

yaitu kepuasan pengguna terhadap layanan internal, dukungan pengkajian dan penelitian yang profesional, netral, beretika, dan akuntabel dilakukan dengan mengukur kesesuaian antara output dan konsistensi waktu penyampaian output Puskadaran DPD RI kepada alat-alat kelengkapan sesuai jadwal persidangan DPD RI (Mataris, 2022). Hal ini diperlukan agar Puskadaran DPD RI dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang didapatkan setelah terkelolanya data Asmasda. Ini juga berimplikasi terhadap program kerja yang akan diusulkan setiap Anggota DPD RI ketika masa sidang berlangsung.

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sasaran	
				2023	2024
1	Tercapainya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Pusat Kajian Daerah dan Anggaran	Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Pusat Kajian Daerah dan Anggaran	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan internal Pusat Kajian Daerah dan Anggaran	3.5 Skala Likert (1-4)	3.7 Skala Likert (1-4)
2	Tercapainya dukungan pengkajian dan penelitian yang profesional, netral, beretika, dan akuntabel	Terwujudnya dukungan pengkajian dan penelitian yang profesional, netral, beretika, dan akuntabel	Rasio hasil pengkajian dan penelitian yang dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan terhadap total pengkajian dan penelitian yang dihasilkan Puskadaran	90%	95%
3	Tercapainya dukungan pengolahan Asmasda yang profesional, netral, beretika, dan akuntabel	Terwujudnya dukungan pengolahan Asmasda yang profesional, netral, beretika, dan akuntabel	Rasio hasil pengolahan Asmasda yang disampaikan tepat waktu kepada alat-alat kelengkapan pada rapat pleno dengan agenda pembahasan tiap masa sidang terhadap total pengolahan Asmasda yang dihasilkan Puskadaran	97%	100%
4	Tercapainya penyajian dan pemasyarakatan hasil-hasil kajian dan penelitian serta pengolahan Asmasda kepada DPD RI dan masyarakat	Terwujudnya penyajian dan pemasyarakatan hasil-hasil kajian dan penelitian serta pengolahan Asmasda kepada DPD RI dan masyarakat	Rasio dokumen hasil kajian dan penelitian serta pengolahan Asmasda yang dipublikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat terhadap total dokumen yang dihasilkan Puskadaran	90%	95%

Tabel 2. Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Sasaran Puskadaran DPD RI

Sumber: Renstra Puskadaran DPD RI (Diakses dari Mataris, 2022).

Penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa Puskadaran DPD RI telah memiliki tujuan sebagaimana yang telah disebut oleh Stephen P. Robbins bahwa untuk mengukur efektivitas organisasi diperlukan tujuan-tujuan yang bersifat strategis dalam mengembangkan suatu organisasi. Dalam konteks studi ini, pendekatan pencapaian tujuan bisa dipakai untuk memenuhi dan mengukur efektifitas pengelolaan data Asmasda pada Puskadaran DPD RI. Terlihat bahwa Puskadaran memiliki tujuan akhir sesuai amanah Tatib DPD RI No. 1 Tahun 2022, ada identifikasi tujuan yang dapat diinterpretasi oleh berbagai kalangan yang terlibat dalam pengelolaan data Asmasda, baik yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek.

Namun, tujuan tersebut tidaklah cukup jika hanya mengandalkan seberapa baik tujuan tersebut disusun, namun perlu memperhatikan analisis sarana-tujuan. Hal ini yang menjadi tawaran penulis untuk lebih mengkontekstualisasikan dari aspek pencapaian tujuan, dengan memperhatikan pada aspek: 1) Aspek standar operasional yang bisa dijalankan dan diwujudkan untuk mencapai tujuan organisasi; 2) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang professional dalam meningkatkan mutu dalam pengelolaan data Asmasda. Steers (1985, p. 162) melihat bahwa analisis sarana-tujuan dapat dilakukan apabila mensinergiskan masing-masing tujuan dari berbagai divisi/bidang yang ternaung dalam suatu organisasi. Dalam hal ini, Puskadaran sebagai organisasi yang berada di bawah naungan Setjen DPD RI, maka tiap-tiap bidang atau divisi yang berada dalam Setjen DPD RI perlu mengalami sinergitas tujuan dengan maksud mencapai tujuan besar yang tertuan dalam peraturan Tatib DPD RI.

Pendekatan Sistem (*System Approach*)

Puskadaran DPD RI perlu memperhatikan sistem atau tata kelola dalam efisiensi kerja, mekanisme komunikasi yang tergabung dalam beberapa bidang atau unit kerja yang mengelola data Asmasda. Guna menunjang efisiensi kerja, Puskadaran DPD RI memiliki situs web dalam menghimpun data Asmasda yang diperoleh Anggota di dapilnya masing-masing. Fasilitas situs yang telah disediakan oleh Puskadaran DPD RI ditujukan untuk kemudahan bagi Anggota DPD RI dalam menginput data Asmasda yang diperoleh ketika masa reses berlangsung, sehingga nantinya muncul tabulasi data Asmasda per Anggota per provinsi dan per agenda prioritas dari masing-masing alat kelengkapan yang ada. Tugas yang menginput data Asmasda ke situs web resmi Puskadaran DPD RI, adalah staf ahli anggota. Menurunnya data penginputan Asmasda disebabkan salah satunya oleh tata kelola informasi antara Puskadaran DPD RI dengan Anggota DPD RI. Meskipun secara kelembagaan, ketersediaan hubungan telah dibentuk, namun kesadaran untuk menginput data Asmasda dari Anggota DPD RI masih lemah.

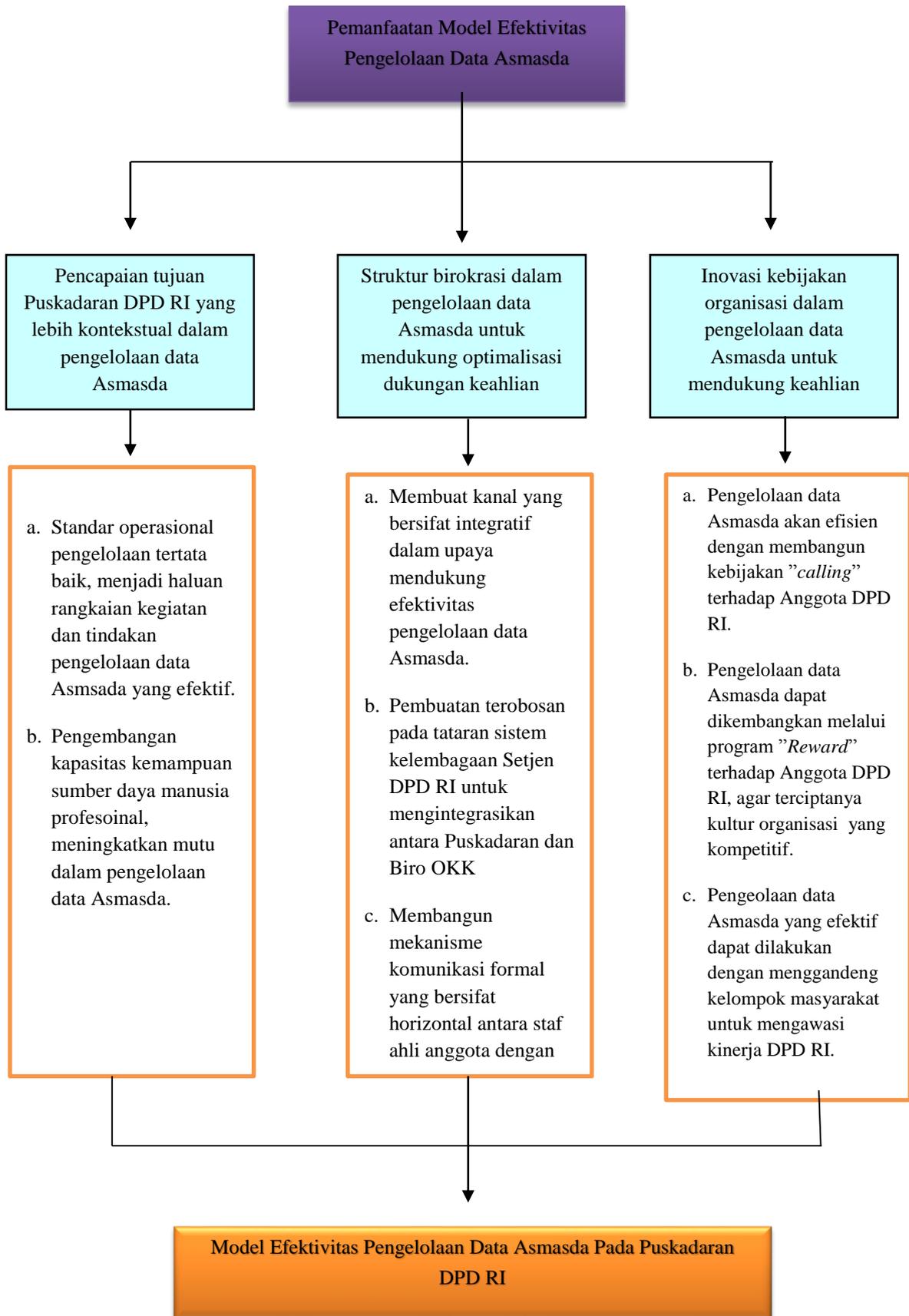
Selain itu, pendekatan sistem dalam melihat efektivitas Puskadaran DPD RI dalam mengelola data Asmasda dinilai terlihat kurang efektif, karena terdapat limitasi kinerja Puskadaran dalam menginput data Asmasda. Dalam pendekatan sistem juga melihat bagaimana komunikasi yang terbangun di antara bidang/unit kerja Setjen DPD RI belum bekerja secara maksimal. Dalam hal komunikasi organisasi, Puskadaran DPD RI cenderung mengadopsi gaya komunikasi yang lebih kaku dan formal. Menurut Robbins (2008, p. 232) bahwa efektivitas organisasi tidak hanya sekedar membangun komunikasi formal, melainkan komunikasi antar bidang secara informal menjadi salah satu aspek dalam penguatan organisasi publik. Informal komunikasi menjadi salah satu upaya untuk peningkatan efektivitas dalam pengelolaan data Asmasda. Kehadiran komunikasi informal juga berkontribusi terbentuknya struktur organisasi yang organik daripada

mekanistik. Namun, penerapan komunikasi yang informal masih mengalami hambatan pada sistem kerja Puskadaran DPD RI.

Di samping itu, kelemahan pada pendekatan sistem terkait pengelolaan data Asmasda pada Puskadaran DPD RI juga menyangkut tentang struktur birokrasi yang bekerja. Puskadaran DPD RI dalam hal ini tidak memiliki otoritas dalam mekanisme *calling* terhadap Anggota DPD RI maupun staf ahli Anggota DPD RI untuk menyetorkan data Asmasda. Upaya yang hanya bisa dilakukan oleh Puskadaran DPD RI hanya menghimbau staf ahli anggota untuk bisa dengan segera menyetorkan data Asmasda. Bahwa staf ahli anggota secara struktural berada di bawah naungan Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian (OKK), sehingga Puskadaran tidak memiliki akses untuk melakukan komunikasi formal dengan staf ahli anggota. Dalam konteks ini, Stephen P. Robbins melihatnya sebagai persoalan pada *chain of command* (rentang kendali), hal ini berkaitan dengan garis kewenangan yang tidak terputus dari puncak organisasi ke lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pekerjaannya (Robbins, 2002, p. 222). Dalam pengelolaan data Asmasda, perlunya menerapkan prinsip kesatuan perintah (*unity of command*) yang mengacu pada hak-hak kewenangan antara Puskadaran DPD RI dan staf ahli Anggota sebagai representasi Anggota DPD RI dalam hal pengelolaan data Asmasda. Setidaknya dalam pengelolaan Asmasda, terdapat kejelasan secara struktural, artinya, staf ahli anggota memiliki kewajiban secara parsial kepada Puskadaran DPD RI khususnya dalam menghimpun dan menyetorkan data Asmasda yang diperoleh dari masa reses Anggota DPD RI.

Model Efektivitas Pengelolaan Asmasda Puskadaran DPD RI

Apabila organisasi dipandang sebagai sistem pengejar tujuan, maka jelas bahwa unsur pokok dalam keberhasilan organisasi adalah kesanggupan manajemen untuk dengan jelas menetapkan sifat khusus dari tujuan dan sasaran yang akan dikejanya (Steers, 1985, p. 160). Dalam hal ini, Puskadaran DPD RI, harus sanggup dan menerima konsekuensi logis dari apa yang telah dikerjakannya selama ini sebagai bagian dalam mencapai tujuan Puskadaran DPD RI. Puskadaran DPD RI sendiri bekerja sebagai tenaga pendukung keahlian yang bertujuan untuk mengoptimalkan melalui berbagai jenis data dan informasi pendukung sebagai bahan masukan dalam persidangan/Alat-Alat Kelengkapan DPD RI maupun dalam rangka sidang atau rapat di kantor daerah.



Dalam membangun kerangka model yang saat ini dibutuhkan oleh Puskadaran DPD RI dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan data Asmasda, terdapat tiga komponen yang harus dipenuhi, antara lain:

1) Pencapaian tujuan yang lebih kontekstual

Pencapaian tujuan menjadi hal yang krusial dalam persoalan suatu organisasi. Terlebih, pencapaian tujuan tidak sekedar menambahkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, melainkan seberapa jauh tujuan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Tata Tertib DPD RI No. 1 Tahun 2022 Pasal 237 menyebutkan secara implisit bahwa penindakan lanjut dalam penyerapan aspirasi yang diselenggarakan oleh DPD RI kemudian dapat dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPD RI sesuai dengan kompetensinya. Untuk tujuan yang parsial pada Puskadaran DPD RI, data sebelumnya menyebutkan bahwa: (a) tercapainya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Pusat Kajian Daerah dan Anggaran; (b) tercapainya dukungan pengkajian dan penelitian yang profesional, netral, beretika, dan akuntabel; (c) tercapainya dukungan pengolahan asmasda yang profesional, netral, beretika, dan akuntabel; dan (d) Tercapainya penyajian dan pasyarakatan hasil-hasil kajian dan penelitian serta pengolahan asmasda kepada DPD RI dan masyarakat.

Setelah tujuan masing-masing bidang dalam Setjen DPD RI sinergis, baru dapat membentuk standar operasional yang baku sehingga dapat diterapkan dalam jangka waktu yang lama. Steers (1985, p. 170) dalam hal ini melihat bahwa pembentukan standar operasional perlu memperhatikan tujuan di setiap bidang internal organisasi, karena standar operasional tidak akan berjalan dengan baik apabila masing-masing bidang mengalami “kontradiksi tujuan”. Sebagaimana penjelasan Oni Choiruddin selaku Deputy Persidangan menyebut bahwa:

“... Kan ini bagian dari alat kelengkapan DPD RI, Setjen sebagai alat kelengkapan. Bahwa tujuan antara Deputy Persidangan dan Deputy Administrasi pasti harus disesuaikan dengan peraturan tata tertib DPD RI tentang fungsi DPD, peran DPD dan kewenangan DPD. Maka sudah pasti sinergis, kalau secara tujuan.”

Selain itu, pada komponen ini juga harus ditopang aspek pemanfaatan sumber daya manusia yang berkualitas. Dari hasil penelitian lapangan, secara umum nilai-nilai bersaing dalam pengelolaan data asmasda pada Puskadaran DPD RI sudah baik. Hampir seluruh sel kriteria efektifitas diatas sudah terlaksana dan berjalan sesuai dengan tujuan dan mekanisme pengelolaan asmasda. Dan tentunya juga guna tercapainya tujuan strategis dari pengelolaan data asmasda yaitu untuk meningkatkan kualitas hasil kerja (*output*) dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPD RI, baik terkait fungsi legislasi, pengawasan maupun pertimbangan.

2) Struktur birokrasi pada Puskadaran DPD RI

Bagian penting dari penciptaan efektivitas organisasi adalah koordinasi yang integratif dari berbagai sub-sistem yang berbeda sehingga sistem-sistem dapat bekerja bersama-sama demi lancarnya pencapaian tujuan organisasi. Dengan mengkoordinasikan sub-sistem, tersedianalah tenaga dan keahlian yang maksimal untuk kegiatan organisasi (Robbins, 2008). Oleh sebab itu, salah satu peranan yang harus diambil oleh Setjen DPD RI adalah melakukan terobosan untuk mengkoordinasikan antar sub-sistem yang berada di lingkungan organisasinya. Hal ini dapat memberikan manfaat berupa: 1) Dapat memberikan petunjuk untuk pembuatan keputusan rutin oleh para staf Puskadaran DPD

RI, dengan demikian menjamin tingkat keseragaman dalam pengambilan keputusan terutama pengelolaan data Asmasda; 2) Dapat meningkatkan koordinasi antar bidang dalam Setjen DPD RI melalui identifikasi yang jelas mengenai kepentingan setiap kelompok/bidang kerja; 3) Dapat menjamin kesinambungan tindakan dalam perjalanan waktu dengan memanfaatkan pengalaman, dan mengurangi pengulangan-pengulangan dalam pengelolaan data Asmasda; 4) Mengurangi terjadinya kesalahan-kesalahan yang sama dalam pengelolaan data Asmasda.

Pembentukan kanal integrasi juga perlu didukung dengan prinsip komunikasi yang lateral (horisontal). Prinsip komunikasi yang horisontal akan mengantarkan kepada budaya kerja yang inklusif antar berbagai bidang, sehingga meminimalisir terjadinya konflik internal dalam suatu organisasi. Selain itu, komunikasi inklusif dapat menghemat waktu dan mempermudah koordinasi. Hal ini salah satu terobosan yang harus dilakukan Setjen DPD RI, maka perlu memotong garis kewenangan vertikal dan dapat mempercepat pengambilan keputusan. Selama ini, dalam pengelolaan data Asmasda terbilang cukup lamban karena tidak ada terobosan yang dapat dilakukan, Puskadaran DPD RI hanya dapat menunggu penginputan data yang dilakukan oleh staf ahli Anggota DPD RI.

3) Inovasi kebijakan pada Puskadaran DPD RI

Inovasi dalam suatu organisasi dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas organisasi demi tercapai tujuan-tujuan organisasi. Robbins (2008, p. 11) menyebut bahwa organisasi yang berkelanjutan adalah organisasi yang menerapkan inovasi dan menguasai seni perubahan. Organisasi akan bertahan apabila inovasi dapat dikontekstualisasikan untuk perbaikan kualitas yang berkelanjutan. Terobosan inovasi yang perlu dilakukan oleh Puskadaran melalui koordinasi “*calling*” terhadap Anggota DPD RI secara langsung. Hal ini dapat dilakukan dengan berkonsultasi dengan pimpinan Setjen DPD RI untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut. Mekanisme *calling* dapat memantau kinerja DPD RI terutama dalam penginputan data Asmasda, karena input data Asmasda selama ini cukup kurang efektif, salah satunya disebabkan keterlambatan yang dilakukan oleh Anggota DPD RI.

Inovasi kebijakan dapat berupa pemberian “*reward*” kepada Anggota DPD RI dalam penginputan data Asmasda. Program ini termasuk klasifikasi penghargaan non-finansial yang cenderung menjadi suatu *smorgasbord* dari “hal-hal” yang diinginkan (Robbins, 2008, p. 276). Menurut Robbins (2008, p. 277), beberapa anggota dalam organisasi akan sangat antusias apabila diberikan penghargaan karena dapat meningkatkan status mereka. Dalam hal ini pemberian *reward* kepada Anggota DPD RI, akan menstimulus Anggota DPD RI untuk aktif dan sadar dalam menginput data Asmasda yang diperoleh dari masyarakat. Peningkatan status juga akan berimplikasi secara politik terhadap citra para Anggota DPD RI dihadapan masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengetahui mana anggota representasinya yang bekerja dengan baik.

PENUTUP

Adapun, terdapat dua (2) kesimpulan penting yang meringkas keseluruhan potret dari studi penelitian ini: 1) Kurang efektifnya berdasarkan pendekatan Stephen P. Robbins. Pada pendekatan pertama yakni pendekatan pencapaian tujuan tujuan ini sangat efektif pada pengelolaan data asmasda pada Puskadaran DPD RI. Bahwa tujuan yang ada sudah ada, sangat mewakili dan memenuhi perintah Tata Tertib DPD RI No.1 Tahun 2022. Hal ini juga terlihat dari rencana strategis yang sudah disusun oleh Puskadaran. Sedangkan pada pendekatan sistem, pengelolaan data Asmasda pada pendekatan ini kurang efektif.

Benar bahwa sistem dan dokumen pengelolaan asmasda sudah ada dan terlaksana dengan baik, namun tingkat kesadaran Anggota yang masih belum kuat semuanya dalam konteks membangun sistem data Asmasda dan Puskadaran tidak memiliki rentan kendali yang cukup dalam meningkatkan data asmasda.

Selain itu, pada pendekatan ini juga memiliki kelemahan terutama benturan birokrasi yang tidak berjalan dengan baik, sehingga Puskadaran sering mengalami kendala dalam pengelolaan data Asmasda. 2) Kerangka model pengelolaan data Asmasda dalam menunjang efektivitas Puskadaran DPD RI. Untuk menangani persoalan efektivitas organisasi, maka perlunya mengadopsi dari kerangka akademis dan mengkontekstualisasikan ke dalam realitas objek penelitian. Dalam hal ini, kerangka model yang saat ini dibutuhkan oleh Puskadaran DPD RI dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan data Asmasda, setidaknya harus memiliki tiga komponen yang harus dipenuhi, antara lain: 1) Pencapaian tujuan yang lebih kontekstual; 2) Struktur birokrasi pada Puskadaran DPD RI; 3) Inovasi kebijakan pada Puskadaran DPD RI.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, A. (2018). *Perilaku dan Teori Organisasi (I)*. Malang: Media Nusa Kreatif.
- Bungin, M. B. (2011). *Penelitian Kualitatif. Prenada Media Grup (II)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- DPD RI. (2020). *Renstra Puskadaran DPD RI 2020-2024*. Jakarta.
- Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2001). *Educational Administration: Theory, Research and Practice*. New York: McGraw Hill Inc.
- Lanten, N. (2022). Survei Catat Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap DPR, DPD hingga Partai Politik Rendah. Retrieved September 19, 2023, from Tribun News website: <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/11/survei-catat-tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-dpr-dpd-hingga-partai-politik-rendah>
- Mataris, H. (2022). *Efektifitas Pengelolaan Data Aspirasi Masyarakat Daerah Pada Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*. Tesis: Universitas Nasional.
- Moenir, A. S. (1987). *Pendekatan Manusiawi dan Organisasi terhadap Pembinaan Kepegawaian*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Mulyasa. (2011). *Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, H. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Robbins, S. P. (1994). *Teori Organisasi: Struktur, Desain & Aplikasi (I)*. Jakarta: Arcan.
- Robbins, S. P. (2008). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Indeks.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.